



Berkenalan dengan Komunitarianisme

Al. Rusmadji

30

Abstract: In the 1990s, 'community' and communitarian ideas became the slogan under which several centre-left politicians base their strategy to seize political power. Communitarian political thought was first a critical reaction to Rawlsian liberal philosophy. Authors such as Charles Taylor, Michael Walzer, Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, amongst many others, criticized the individualist and atomistic premises of procedural liberalism developed by John Rawls and some of his followers, and argued instead that individuals are socially embedded. Communitarianism concerns more with forwarding a blueprint to solve problems of contemporary societies and contains prescriptions for how to create the "good society". With the communitarian diagnoses in his hands, Amitai Etzioni prepares a road to the good society proposing community as a weaving of bond of shared values and goals, moral culture, service learning, balanced right-responsibility, and balanced autonomy-order.

Keywords. Liberalisme • Komunitarianisme • Komunitarian • Komunitas • Nilai-nilai bersama • Tujuan-tujuan bersama • Budaya Moral • Good Society.



“It is that same spirit of determination, and the power of community, that should be the country’s guide in this year of challenge. ... the challenge we face has to be met by us together. One nation. One community. Social justice. Partnership. Cooperation. The equal worth of all. The belief that the best route to individual advancement and happiness lies in a thriving society of others. Words and concepts derided in the 80s. These are the values of today. Not just here but around the world. ‘It’s up to me’ is being replaced by ‘it’s up to us’. The crude individualism of the 80s is the mood no longer. The spirit of the times is community.”

Tony Blair¹

*S*tilah dan tema diskusi tentang komunitarian jarang muncul dalam tulisan-tulisan di Indonesia, namun hal itu kerap tampil dalam diskusi-diskusi di Eropa dan Amerika yang melibatkan akademisi, politisi, maupun praktisi yang bergerak di bidang sosio-ekonomi, kesehatan, atau pengambilan kebijakan umum yang menyangkut kesejahteraan orang banyak.² Tema tersebut mencuat karena para politisi, praktisi kebijakan publik, jurnalis, dan akademisi melihat bahwa *komunitas* memainkan peranan amat menentukan dalam membangun demokrasi, kebebasan, kesamaderajatan, pemberdayaan kelompok kecil, akuntabilitas publik, dan lain sebagainya.³ Buah perdebatan ini antara lain tampak dalam

¹ Pidato Tony Blair – yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris sampai sekarang – di depan Kongres Partai Buruh di Blackpool pada tahun 1998.

² Latar belakang politis mencuatnya *komunitas* menjadi kata kunci dalam dunia politik dan akademik dapat ditemukan kembali pada tahun 1960 – 1970-an ketika pemerintah pusat ataupun daerah Amerika Serikat melangsir *community development projects* yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok-kelompok kecil masyarakat supaya mereka relatif mandiri, lih., R.B. Fowler 1991, *The Dance with Community: The Contemporary Debate in American Political Thought*; H. Butcher (et al.) 1980, *Community Groups in Action: Case Studies and Analysis*. Daftar bibliografi lengkap dapat ditemukan pada artikel karangan Matthias Proske 1994, “Zur Debatte um den Kommunitarismus. Eine kommentierte Bibliographie”.

³ Tony Blair yang waktu itu merupakan pemimpin Partai Buruh, berkata dalam suatu wawancara pada 12 Maret 1995 mengenai usul mengganti rumusan clausul 4 dalam Anggaran Dasar Partai Buruh Inggris: “*We believe in the values of community, that by the strength of our commitment to common endeavour we can achieve the conditions on which individuals can realise their full potential. The basic principle is solidarity, that*

program-program *community policing*, *community justice*, *community health*, dan *care in the community* yang dilaksanakan di Inggris dan Amerika.

Perdebatan itu makin banyak menarik perhatian ketika dilansirnya *The Third Way* oleh Anthony Giddens yang mau menjembatani ketegangan-ketegangan dalam dunia *post-modern*, namun juga memiliki pengaruh pada politik praktis yang mau menghubungkan kubu “kiri” dan “kanan”. Namun kemudian disusul oleh prasarana Amitai Etzioni tentang *The Third Way to a Good Society* yang mengangkat pentingnya komunitas dalam proyek membangun negara demokratis dan masyarakat sipil yang baik dan dengan demikian mau melampaui *The Third Way*-nya Giddens.

Tulisan ini hendak mengangkat wajah komunitarian dalam wacana intelektual. Pertama akan disodorkan ringkasan sejarah perkembangan pemikiran komunitarian, kemudian disusul dengan debat komunitarian dan liberalisme yang menyulut perdebatan luas di kalangan intelektual, dan akhirnya akan dipaparkan beberapa tema yang akrab di kalangan komunitarian.

Komunitarian

Komunitarian, menurut Etzioni⁴, sosok paling terkemuka di dalam lingkungan komunitarian Amerika Serikat dewasa ini, merupakan filsafat sosial yang hendak mengedepankan realitas sosial, secara khusus komunitas. “Prasejarah” dari pemikiran ini dapat dikembalikan pada Ferdinand Tönnies (1855-1936) yang menempa istilah *Gemeinschaft* yang dibedakannya dari *Gesellschaft*; Emile Durkheim (1858-1917) yang meneliti fungsi nilai dalam integrasi sosial

people can achieve much more by acting together than acting alone. I think that all this is best represented by the idea of community, in which each person has the right and duties that go with community and we act together to achieve power, wealth and opportunity for all, not for the few” dikutip dari Martin Kettle, “Blair Puts Faith in Community Spirit”, dalam *Guardian* 13 Maret 1995.

⁴ Amitai Etzioni lahir di Köln dengan nama Werner Falk, kemudian bersama keluarga ia pindah ke Palestina tahun 1939 karena ancaman Nazi. Ia menjalani studi di Universitas Hebraica di Yerusalem, Universitas Berkeley, Amerika Serikat. Sejak tahun 1963 ia memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat. Ia mengajar di beberapa universitas di Amerika Serikat, dan sejak tahun 1980 ia menjadi profesor di Universitas George Washington. Tahun 1993 ia mendirikan *The Communitarian Network* yang aktif menjalankan diskusi mengenai soal-soal sosial-kemasyarakatan di kalangan akademisi dan pemikirannya turut pula mempengaruhi kebijakan para pemimpin politik, seperti Bill Clinton, Hillary Clinton, Al Gore, dll. Mengenai pengaruh dan resepsi pemikiran Etzioni pada para politisi, lihat W. F. Power 1995, “Can a Nation of Individuals give Community a Sporting Chance” dalam *Washington Post* 3 Feb 1993; Martha Sherrill 1993, “Hillary Clinton’s Inner Politics” dalam *Washington Post* 6 Mei 1993.

serta hubungan antara masyarakat dan individu; George H. Mead (1863-1931) yang mempelajari secara khusus proses pembentukan diri dalam lingkup sosial.

Ide komunitarian memang sudah merebak di pertengahan abad sembilan belas, namun komunitarian sebagai suatu cita-cita sudah jauh sebelumnya ada, terlebih di lingkungan keagamaan, khususnya umat Israel di masa Perjanjian Lama dengan pemahamannya tentang *b^érit* dan juga masih berlangsung pada masa Perjanjian Baru. Teologi kristen juga menekankan pentingnya komunitas, antara lain mengidentikkan Gereja sebagai suatu komunitas, (Kis 4:1-6, 1Kor 12:1-12), paham akan persekutuan para kudus, teologi ekaristi sebagai forma persekutuan, atau ajaran sosial Gereja sejak dikeluarkannya ensiklik *Rerum Novarum* oleh Paus Pius XIII yang memperlihatkan perhatian Gereja pada masalah-masalah sosial maupun paham diri Gereja sebagai komunitas yang berbeda dengan sosialisme-komunisme yang tidak menempatkan manusia sebagai persona.⁵

Istilah komunitarian sebagaimana sekarang ini dipakai baru lahir sekitar tahun delapan puluhan ketika muncul suatu perdebatan yang kemudian diberi label debat komunitarian melawan individualisme dari liberalisme klasik yang diwakili oleh John Rawls, Ronald Dworkin, dan Robert Nozick.⁶ Dengan mengkritik paham hak setiap individu untuk menentukan dan mengejar kebutuhan dan kebahagiaan masing-masing, komunitarian menekankan bahwa individu secara kodratiah bersifat personal dan bahwa ia “tertempel” (*embedded*) pada masyarakat (Etzioni 2003: 225).

Dalam perdebatan itu komunitarian sebenarnya merupakan nama yang mempersatukan sejumlah pikiran, suatu konstruksi dan proses “yang dengannya dibangun suatu cara baca interpretatif atas teks-teks yang memuat pokok-pokok fundamental dan metodologis yang jamak ditemukan pada peserta yang mengkritik individualisme liberal” (Bellah 1995: 12), karena sebenarnya tiap-tiap peserta perdebatan tersebut memiliki tekanan dan perbedaan yang cukup signifikan dalam mengungkapkan anti-individualisme

⁵ Pada tempatnya pula di sini ditambahkan sumbangan agama-agama lain dalam membentuk visi komunitarian. Pada Islam terdapat tempat yang amat penting untuk komunitas, *ummah*, atau di kalangan orang Yahudi modern terdapat *kibbutz*; atau di kalangan Konfusianis yang mengaitkan amat erat Buddhisme dan ibadat-ibadat keagamaan tradisional untuk keluarga, nenek moyang. Juga etika konfusianis yang menaruh komunitas pada tempat sentral cukup banyak berpengaruh dalam formasi komunitarian. Nuebel 2000, Tavis dan Tavis 2003:3.

⁶ Sebagian orang menganggap ketiga tokoh tersebut merupakan tokoh paling menonjol dari tradisi liberal, namun sebagian lain, seperti halnya Michael Freedman yang mengarang buku *Ideologies and Political Theory* menganggap mereka bukanlah wakil dari tradisi liberal.

mereka⁷ atau dalam beberapa tokoh dan dalam tema-tema tertentu mereka sekali lagi mengafirmasikan komitmen mereka akan nilai-nilai kebebasan dan pentingnya hak, yang adalah nilai-nilai fundamental pada liberalisme (Proske 1994).

Tiga hal yang mempersatukan mereka ialah pertama, individu bukanlah segala-galanya, karena kolektivitas, institusi, relasi, dan makna tidak dapat direduksikan ke dalam dan digantungkan pada individu. Kedua, pandangan liberalis yang mengatakan bahwa individu yang digambarkan selalu terancam dan di bawah bayang-bayang masyarakat dan kuasa-kuasa tradisional seperti suku, kampung, Gereja, bahkan famili dan dengan demikian kebebasan individu haruslah dilindungi adalah berat sebelah. Komunitarian beranggapan bahwa deskripsi tersebut meremehkan arti komunitas dalam pembentukan individu serta menganggap sepi peran hubungan antar-individu yang dapat mencairkan kekakuan relasi yang dicirikan dengan kuasa. Ketiga, dengan tetap menerima institusi-institusi modern seperti negara dan pasar yang secara dominan bercirikan instrumental dan keluarga yang bercorakkan hubungan interpersonal, komunitarian menyebutkan adanya sektor ketiga⁸ yang bergerak berdasarkan “kehendak bebas dan keputusan individu” yang memainkan peran dalam pengembangan pribadi, hubungan antarpribadi serta nilai-nilai resiprositas, kepercayaan, solidaritas, dan tradisi seperti kelompok relawan, lembaga swadaya masyarakat, dll (Zimmer 2001).

Debat akademis dengan individualisme liberal tersebut turut mempertajam aspek teoretis pendirian dan fokus perhatian kaum komunitarian. Berkat perdebatan akademis mereka dengan liberalisme, mereka menjadi sadar bahwa suatu komunitas – karena tradisi yang membentuknya – juga bisa dihindangi penyakit otoritarianisme, paternalisme, bahkan ada yang represif. Dengan demikian, tidak semua komunitas “bernilai baik”. Etzioni kemudian mendefinisikan komunitas yang diidamkan oleh komunitarian sebagai “jejaringan (Inggris: *web* dan *network*) hubungan-hubungan antara suatu kelompok individu, suatu hubungan yang seringkali bersimpangan dan memperkuat satu sama lain.” Dengan menyebut komunitas sebagai jejaringan, Etzioni bermaksud untuk mengatakan bahwa orang modern tidak hanya

⁷ Bellah memberikan suatu tinjauan analitis atas anti-individualisme ini dengan meringkaskannya dalam tiga tesis “*first, it is not the case that all there is in the world is individuals. Communitarians, like many other social philosophers, are likely to argue for the non-reducibility and significance of collectives, institutions, relations, meaning, and so on.*” Bellah 1995: 51.

⁸ Karena keterbatasan tempat kami tidak dapat menjabarkan secukupnya sektor ketiga yang banyak dibahas baik oleh para pengkritik maupun pendukung komunitarian. Pembahasan mengenai pokok ini dapat dilihat pada Zimmer 1994, Etzioni 2001, Ehm-Schöninklee 1994.



menjadi anggota dari satu komunitas, melainkan beberapa. Seorang dapat menjadi anggota komunitas sepakbola, suku Papua, ikatan cendekiawan, anggota kring suatu paroki. Lagi pula, jejaringan – berbeda dengan rantai – mengandaikan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain terhubung secara saling silang, bukan satu-dengan-satu. Ciri kedua dari komunitas ialah budaya moral: komitmen akan seperangkat nilai yang merupakan nilai bersama (Etzioni 2003: 226). Pandangan tentang komunitas semacam itu kemudian digelarnya menjadi program pemberdayaan dan penciptaan komunitas-komunitas di Amerika Serikat.

Pemikiran Etzioni yang memberikan arah yang jelas bagi refleksi sosio-politis komunitarianisme menjadikan komunitarian kemudian mulai diterima positif di banyak belahan dunia. Idenya mengenai nilai-nilai bersama dan tujuan-tujuan bersama (*shared values* dan *shared goals*) didiskusikan para ahli, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang dianut di beberapa tempat di Asia yang dicirikan dengan paternalisme, otoritarianisme, dan represi. Demikian pula pemikirannya mengenai dialog moral mendapatkan tanggapan hangat di kalangan akademisi yang mempertanyakan cara dialog tersebut diadakan sehingga kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan adil. Masih ada tema-tema lainnya yang dilontarkan Etzioni yang menggelitik para cendekiawan dan para pelaku politik, dengan demikian diskusi tentang komunitarian kembali mendapatkan tempat di ruang akademik untuk dipertajam dan dijernihkan (Ehm-Schöninklee 1994: 10).

Perkembangan komunitarian memasuki babak baru ketika tahun 1990-an suatu kelompok intelektual hendak menerjemahkan ide-ide komunitarian pada ranah sosio-politis. Pada tanggal 18 November 1991 mereka mengkampanyekan *Platform Komunitarian* yang berisi gagasan untuk memperkuat kembali moral dan tata sosial Amerika yang dimulai dari keluarga dan sekolah dan yang sasaran akhirnya ialah terbentuknya a *good society*.⁹

Kritik Komunitarian atas Liberalisme

Debat komunitarianisme dan liberalisme individual sering diasosiasikan dengan kritik Michael Sander dengan bukunya *Liberalism and the Limits of Justice*, Michael Walzer dengan karyanya *Spheres of Justice*, dan *After Virtue* karangan Alasdair MacIntyre terhadap buku karangan John Rawls *Theory of Justice*.¹⁰

⁹ The Communitarian Network, *The Communitarian Platform*, Indirizzo <http://www2.gwu.edu/~ccps/platformtext.html>.

¹⁰ Pengelompokan ketiga pengarang tersebut di atas ke dalam kubu komunitarian diberikan oleh para pembaca dan peserta diskusi antara kelompok komunitarian dan liberalisme. Ketiga pengarang tersebut tidak secara intensional mewakili teori politis yang mengusung bendera komunitarian, bahkan MacIntyre terang-terangan menolak label bahwa dirinya seorang komunitarian dalam artikelnya “the Spectre of



Pokok perdebatan itu berporoskan pada paham tentang individu dan universalitas keadilan.

Yang memicu perdebatan antara komunitarian dengan liberalisme ialah paham Rawls tentang individu. Individu dimengerti sebagai entitas yang secara ideal bersifat rasional, dengan kesadaran-diri, kemampuan untuk menyatakan pendapat dan diri serta pilihan-pilihannya. Agar kemampuan-kemampuan itu dapat diwujudkan, individu haruslah tidak terjebak oleh ikatan-ikatan tradisional maupun emosional. Dengan tujuan yang sama pula, individu haruslah dilindungi dari kuasa negara, kuasa sosial, dan dari kuasa-kuasa lainnya yang tidak rasional atau tidak mendukung pernyataan diri individu

Akan tetapi menurut hemat komunitarian, individu beserta pembentukan identitasnya, nilai-nilai yang dianutnya serta pemahamannya akan dunia dibentuk dan dikonstruksikan oleh masyarakat dan mendapatkan ekspresinya yang tepat dalam masyarakat pula. Orang sudah mulai menghirup dan membatinkan nilai-nilai dan pandangan dunia yang dianut oleh masyarakat/komunitas tempat ia dibesarkan. Pembatinkan nilai dan pandangan dunia masyarakat itu dimulai dari pendidikan di rumah lewat orang tua dan kerabat dekat, dan diteruskan dengan pendidikan formal yang kemudian dijalanninya lewat bangku sekolah. Penerusan *social goods* pada tingkat pertama jauh lebih mendalam dan mempengaruhi tata nilai dan orientasi si anak daripada tingkat kedua. Bila – dan justru karena itu – orang meresepsi nilai-nilai serta pandangan dunia komunitasnya, ia akan menjadi anggota masyarakat/komunitas itu.¹¹ Bila demikian halnya, penilaian dan resepsi rasionalitas dan universalitas keadilan banyak ditentukan oleh formasi tata nilai dan pandangan dunia yang dimiliki oleh seseorang berdasar tata komunitas dan budayanya. Apakah masih ada tempat untuk rasionalitas universal seperti

Communitarianism”, *Radical Philosophy* 70 (March/April 1995). Lihat. Sayers 2004: 1; Etzioni 2004: 19, Ehm-Schöninklee 1994

¹¹ Analisis kritis pembentukan *diri* modern (*self*) Taylor mengungkapkan bahwa ia sependapat dengan MacIntyre yang mengatakan bahwa *diri* modern berbeda dengan *diri* tradisional yang lekat bersatu dengan komunitas tempat ia berada. Namun berbeda dengannya, Taylor menegaskan bahwa *diri* modern tersebut bukanlah merupakan *encumbered self*, dan jaman modern secara hakiki tidak merupakan *fragmentation, destruction, loss of community*. *Diri* modern merupakan *hasil* positif dan unggul struktur-struktur sosial-historis yang baru serta *sumber* modernitas itu sendiri. *Diri* modern adalah *diri* yang ditandai dengan otonomi parsial dan relatif. *diri* bukan hanya *terberi*, tapi harus selalu diberi bentuk dan diartikulasikan seturut lingkungan sosial-historis yang ada. Taylor 1989: 99 dst.

yang diproyekkan oleh *Aufklärung*, demikian salah satu tema pertanyaan besar yang diajukan oleh komunitarian kepada Rawls?¹²

Pokok perdebatan kedua ialah sekitar paham tentang universalitas keadilan. Michael Walzer – dengan tetap menganggap diri berada di rel universalis – membedakan dua macam universalitas, yakni universalitas menyeluruh dan universalitas mendalam.¹³ Walzer, lebih lanjut, menyatakan bahwa distingsi tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa yang pertama lebih baik daripada yang kedua, bahwa paham yang memuat asas-asas fundamental tentu lebih baik dari yang mengandung bermacam deskripsi. Perbedaan tersebut menyadarkan kita untuk mau mengerti lebih jauh muatan-muatan historis paham tentang konsep-konsep yang biasa diterima universal dan menggapai aspirasi-aspirasi luhur yang termuat dalam konsep-konsep lokal dalam hal moral (Walzer 1998: 534, Demmerling 2002:7).

Universalitas menyeluruh adalah suatu paham yang memuat suatu klaim yang berlaku untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan tempat. Universalitas semacam ini berpijak pada satu praandaian bahwa ada satu Allah, oleh karenanya hanya ada satu hukum, satu keadilan, satu paham akan hidup yang baik, masyarakat yang baik dan pemerintahan yang baik pula bagi seluruh umat manusia (Walzer 1998: 510). Lebih lanjut, Walzer menyatakan bahwa paham akan universalisme yang demikian itu memiliki akarnya dalam tradisi Yudaisme dan Kristen yang mau menjadikan diri mereka “terang bagi segala bangsa”. Dalam filsafat konsep ini merupakan upaya filsafat yang mau membawa seluruh umat manusia pada satu tujuan dan mencanangkan proses

¹² Terhadap posisi kaum komunitarianisme yang berporoskan pada “konstruksionisme sosial” atau “partikularisme” dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut: dalam dunia yang makin berelasi satu sama lain, masih adakah suatu unit sosial yang terluput dari interaksi yang makin global atau yang tertutup demikian rupa sehingga tidak dapat mengenal unit sosial lainnya, lih. Magnis-Suseno 2000: 211, Dietrich 1998: 4

¹³ Walzer memakai beberapa istilah yang berbeda-beda untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai pahamnya tentang universalitas. Pada “Nation and Universe” ia memakai istilah *covering-law universalism* dan *reiterative universalism* (Walzer 1998: 510.519). Sementara itu dalam bukunya *Thin and Thick. Moral Arguments at home and abroad* ia memakai beberapa istilah lain untuk mengungkapkan pahamnya tentang universalitas argumentasi moral, *maximalist* dan *minimalist*, *thin* dan *thick*, *local* dan *universal*. Istilah “*thin*” dan “*thick*” dipinjamnya dari Geertz dalam bukunya *Tafsir Kebudayaan*, yang pada bab pertamanya dibahas tentang “Thin and Thick Interpretation” (Yogyakarta: Kanisius, 1992: 3-30). Geertz sendiri meminjam istilah itu dari Gilbert Ryle yang dipakainya dalam konteks *conspiratorial wink*. Dalam dunia etnografi, *thick description* adalah deskripsi yang menguraikan suatu kejadian atau perbuatan demikian rupa sehingga dihasilkan dipahami, dan ditafsirkan lapisan-lapisan yang bermakna yang tersimpan di dalamnya (Geertz 1992: 20).

politik dari seluruh bangsa di bawah satu kesatuan prinsip-prinsip (Walzer 1998: 512).

Metode yang cocok untuk model pertama ini ialah “menemukan”. Bila ditelusuri ke belakang, universalitas ini menaruh jangkarnya pada hukum kodrat. Untuk mengerti isi paham dan cakupan universalitas tipe ini orang haruslah menemukan *makna* yang terpendam dalam kehidupan dan mengungkapkannya secara teoretis. Dari ungkapan teoretis itulah akhirnya disusun norma-norma yang sekiranya berlaku untuk semua orang dan memiliki klaim “universal” (Walzer 1998: 512; Dietrich 1998: 3).

Kritik yang dilemparkan Walzer ialah paham semacam itu mengandaikan bahwa universalisme semacam itu lebih kurang rasional murni dan netral terhadap aneka macam pandangan yang dilatarbelakangi oleh aneka macam *setting* tradisi kebudayaan. Universalisme macam ini bersifat triumphalistik dan buta terhadap pluralisme bentuk kehidupan manusia, kata Walzer (Walzer 1989: 511).

Universalisme tipe kedua ialah universalisme mendalam yang “cara pandang partikular dan tendensi pluralis” (Walzer 1998: 513, Etzioni 1996: 128, *idem*. 2003: 56). Secara historis prinsip-prinsip moral biasanya dirumuskan berdasarkan dan/atau berlatarbelakangkan suatu pengalaman historis, seperti penindasan, kelemahan, ketakutan atau penggunaan kuasa yang melampaui batas. Pengalaman-pengalaman macam itu memunculkan kesadaran akan diri sendiri serta meminta bantuan dari orang-orang lain. Pengalaman-pengalaman negatif seperti disebutkan di atas bukan hanya terdapat di Israel, melainkan bisa juga dialami oleh setiap orang atau bangsa. Hanya tanggapan atas pengalaman macam itu berbeda-beda berdasarkan situasi sosio-kultural, paham tentang ideal hidup, cara berpikir orang setempat, dll., dan oleh karenanya, norma-norma moral yang dihasilkannya pun berbeda pula isi dan namanya (Walzer 1989: 529). Satu hal yang patut ditambahkan ialah universalitas norma-norma ini selalu menjadi sasaran kritik dan evaluasi, baik dari sudut pandang keyakinan dan paham yang terlebih dahulu ada atau dari pandangan orang luar atau tanggapan-tanggapan lainnya. Memang demikianlah – menurut Walzer – halnya harus berjalan, agar semakin kepenuhan hidup makin ditangkap, agar pemahaman baru diciptakan.¹⁴

¹⁴ Walzer memberikan perumpamaan mengenai pembaruan terus menerus ini dengan sebuah contoh demikian. Seorang arsitek pada jaman tertentu merancang sebuah gedung yang amat sesuai dengan tempat dan waktu itu, namun arsitek dari zaman kemudian menilai gedung tersebut tidak cocok dengan situasi dan kondisi sejaman, oleh karenanya, ia mengubah dan bila perlu membangun gedung baru yang lebih sesuai dengan tuntutan jaman. (Walzer 1989: 527)



Maka, haruslah disimpulkan bahwa universalitas haruslah diperbarui terus seturut perkembangan sejarah dan tempat, dan universalisme ini bukanlah dicocorkan dari luar, melainkan hasil bentukan masyarakat setempat. Memang pada mulanya hanya terdapat visi dan benih-benih univerasalisme, namun dari sanalah harus dikembangkan apa yang sungguh benar, adil, penting, dan lain-lain (bdk. Etzioni 2003: 56).

Bagaimana hubungan antara kedua konsepsi akan universalitas tersebut? Walzer menyatakan bahwa universalitas mendalam tetap merupakan suatu bentuk universalitas. Setiap kali orang merumuskan norma-norma universal mendalam, orang merumuskannya dengan acuan pada paham-paham universal menyeluruh. Memang tidak dijamin hal itu terjadi, namun yang pasti ialah perumusan norma-norma universal mendalam mengandaikan bahwa orang mampu memahami “sejarah partikularnya adalah miliknya dan sejarah yang lain adalah milik orang lain dan kedua sejarah itu merupakan sejarah umat manusia ... Kita bisa melihat bahwa kita adalah satu keluarga dengan karakter yang berbeda.” (Walzer 1989: 521)

Lagi pula, pemahaman lokal sering kali berkembang menjadi klaim universal menyeluruh. Namun, sebaliknya juga bisa terjadi, universalitas menyeluruh menjadi lebih sadar akan isi historis dan konteks sosio-kultural yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, ia menjadi lebih “mendalam”. Prinsip-prinsip moral selalu pada awalnya dimengerti sebagai universal “menyeluruh”, diandaikan berlaku di mana-mana dan kapan saja, terintegrasikan dalam budaya, dan klaim tersebut akan menjadi “mendalam” ketika – dan hanya pada kesempatan-kesempatan tertentu saja – prinsip moral itu hendak digunakan demi tujuan-tujuan khusus dan menjawab pengalaman-pengalaman baru. Misalnya, hormat terhadap orang tua menjadi hormat kepada orang yang lebih tua umurnya (Walzer 1989: 527).

Pemikiran Walzer mengenai universalitas sudah terjejak pada bukunya *Spheres of Justice* yang mengajukan suatu paham tentang keadilan. Keadilan itu bersifat universal secara distributif, artinya ia tersedia di banyak tempat yang kualitas dan cara pemahaman akan keadilan itu berlain-lainan; keadilan dipahami secara berbeda tergantung pada tempat dan waktu, serta kondisi yang ada pada saat itu. Dengan mengatakan hal itu, ia tidak bermaksudkan bergandengan tangan dengan subjektivisme sebagai prinsip dasar pemikirannya. Ia hanya menggarisbawahi perlunya memikirkan ulang norma-norma moral dengan memperhitungkan sungguh pluralitas budaya, atau perlulah dicari suatu norma-norma moral transkultural. Ia tidak bermaksudkan menolak universalitas keadilan, tapi ia mengedepankan keadilan yang universal-absolut tersebut tersebar, dimiliki oleh segala bangsa secara bersama-sama (*widely shared*). Misalnya, di Malaysia hukuman yang adil untuk pengedar narkoba ialah hukuman gantung, sementara di negara Indonesia



ialah masuk penjara. Namun kedua negara merasa perlu menghukum pengedar narkoba tersebut yang telah merugikan kebaikan umum.

Walzer juga menyebut rasa keadilan tersebut ditentukan oleh lingkungan (*sphere*). Ia menyebutkan ada sebelas lingkungan yang membuat paham tentang keadilan tersebut bisa berlainan, yakni *Membership, Security and Welfare, Money and Commodities, Office, Hard Work, Free Time, Education, Kinship and Love, Divine Grace, Recognition and Political Power*. Di lingkungan pasar, adalah adil bila orang menukar suatu barang dengan uang; namun menjadi tidak adil bila uang dipakai untuk mendapatkan pangkat, kedudukan, pengadilan, dll.

Dua argumentasi yang dikemukakan di depan hendak mengusung satu kepentingan ini: komunitas setempat beserta tradisi, kebiasaan, dan pemahamannya. Diskusi mengenai universalitas, moral atau politik tidaklah dilakukan “di atas awan-awan”, melainkan terduduk pada tradisi lokal yang memberikan horison makna atas pokok yang dibicarakan. Tidak pada tempatnya, menurut hemat Walzer, bahkan immoral bila orang memaksakan pada orang lain suatu klaim yang menurutnya benar, sah tanpa mempertimbangkan perbedaan-perbedaan tentang ideal hidup yang berlaku di komunitas setempat.¹⁵

Dengan mengusung keprihatinan tersebut, Walzer mengambil jarak dari posisi kaum liberal, seperti Rawls yang mengajukan prinsip moral universal yang lebih kurang netral, terlepas dari agama, budaya, dan paham-paham moral yang berlainan yang mengandung di dalamnya konfigurasi nilai yang berlainan pula. Entah orang beragama muslim atau kristen, tidak beragama atau kaum esoteris, entah penikmat dunia atau asketis, laki-laki ataupun perempuan, prinsip-prinsip moral universal berlaku bagi mereka semua (Dietrich 1998: 3-6).

Debat liberalisme dan komunitarianisme menjadi bias (Zimmer 2001: 10), dan tidak selalu berfokus pada buku Rawls *A Theory of Justice* melulu. Dalam perdebatan itu secara tidak disadari sungguh tercipta kubu-kubu dan lebih tajam lagi kubu-kubu tersebut diberi label. Yang pertama diberi stempel kaum liberal atau kaum individualis, dan yang lainnya diberi nama kaum komunitarian. Tambahan pula, peserta diskusi yang ikut masuk kemudian sering melebih-lebihkan, salah membaca ataupun salah merepresentasikan posisi kedua kubu tersebut. Bagaimanapun, tema-tema komunitarian tetap

¹⁵ “We act immorally whenever we deny to other people the warrant for or what I will now call the rights of reiteration, that is, the right to act autonomously and the right to form attachments in accordance with a particular understanding of the good life.” Walzer 1989: 536.

mendapatkan tempat terhormat dalam filsafat liberal, atau sebaliknya nilai-nilai kebebasan amat dijunjung tinggi dalam komunitarian.¹⁶

Satu catatan lagi patut ditambahkan. Debat komunitarianisme dan liberalisme di atas berkembang dalam konteks akademik. Namun demikian para peserta debat sama-sama memiliki minat dan maksud praktis, yakni mau mengerti dan memberikan sumbangsih bagi disput tentang kesejahteraan publik, keadilan sosial, dan demokrasi, namun kedua belah pihak tetap berpijak pada wilayah mereka sendiri dan tidak beranjak untuk belajar menyelami argumentasi pihak lain. Kaum liberal menjawab keberatan kaum komunitarian dengan jargon liberal, demikian pula sebaliknya (Ehm-Schöninklee 1994: 3).

Filsafat Politik Komunitarian

Menelaah Kembali Komunitas

Shared values dan shared goals

Pokok tentang universalitas yang banyak diperdebatkan dalam kritik komunitarianisme atas individualisme liberal di atas dilanjutkan dalam diskusi tentang komunitas dan negara. Karena menempatkan komunitas sebagai salah satu kata kunci seluruh pemikirannya, kepada komunitarian sering ditanyakan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan komunitas, sebab istilah tersebut sering kali dipakai dalam arti dan konteks yang berlainan.¹⁷ Bisa dijumpai komunitas disamakan dengan klas sosial tertentu, atau kelompok elit, bahkan digunakan untuk menunjukkan tipe rasionalitas tertentu yang berbeda dengan rasionalitas yang dianut oleh kelompok lain. Kalau demikian, apakah ada suatu pengertian yang mendasar tentang komunitas?

Menurut Etzioni, secara tradisional istilah komunitas diasosiasikan dengan hubungan yang dekat, akrab, dan saling menerima satu sama lain. Maka sifat yang ditonjolkan di sini ialah emosional. Namun, persis sifat emosional ini sering menjadi titik kritis bagi komunitas, karena atas dasar alasan emosional pula pernah terjadi hal-hal yang melanggar keadilan dan menginjak-injak rasionalitas. Sebutlah contoh seperti atas nama loyalitas

¹⁶ Tinjauan kritis ini mendasarkan diri pada Ujan 2001. John Rawls kemudian dalam tulisan-tulisannya menekankan pentingnya tradisi dalam politik liberalisme dan menyatakan implikasi partikular dari teori keadilan universalnya hanyalah berlaku pada konteks demokratis dan pluralistik saja. Lih. Rawls 1993: 14. 156.

¹⁷ Putnam, yang juga seorang pendukung komunitarian, malahan tidak terlalu senang dengan istilah komunitas, karena istilah itu sudah menjadi “queen of social sciences, economics, and other followers of the neoclassical paradigm”. Ia menggantikannya dengan “social capital” yang menurutnya lebih “efficient” dan “rational”, Putnam, Robert D., 1995: 65-78.

terhadap komunitas, orang menyingkirkan sesamanya yang tidak sesuku atau bukan seagama (Bellah 1995: 49, Etzioni 2000: 7, Galston 2004: 5). Bila demikian halnya, pengertian komunitas sebagai paguyuban yang dibangun atas dasar sentimen – dipakai ungkapan Christopher Lasch: *psychological placebo* – lebih banyak menuai kritik daripada mengembangkan diskusi dan pemahaman yang tepat.

Komunitas, menurut Etzioni yang mengikuti jejak Buber, pada dasarnya suatu paguyuban yang dicirikan oleh hubungan *I-Thou*, suatu hubungan antarpribadi yang memperlakukan yang lain sebagai subjek yang berada pada tempat setara dan pantas dihormati, sebagai *ends in themselves*.¹⁸ Hubungan yang akrab dan penuh hormat ini dibedakan dengan tipe *I-it*, suatu relasi yang memperlakukan orang lain sebagai benda atau sarana untuk mencapai sasaran atau interese tertentu, seperti yang sering terdapat dalam dunia pasar ketika orang (memilih) berelasi dengan yang lain agar mendapatkan keuntungan (makin) besar. Kelompok macam ini lebih baik disebut dengan *interest group* (Etzioni 2000: 4).

Pada tataran sosiologis, perwujudan nyata relasi *I-Thou* seperti dipaparkan di atas tampak pada ikatan antar para anggota, yang menjadikan komunitas itu seakan-akan satu keluarga besar. Ikatan tersebut bukan hanya – meskipun ini amat ditekankan oleh Etzioni – sebatas afeksi, melainkan pula meliputi nilai-nilai yang dianut bersama (*shared values*) dan sasaran-sasaran yang menjadi tujuan terbentuknya komunitas (*shared goals*) (Etzioni 2002: 8, Bellah 1995: 49).

Bila demikian, komunitas hanya mungkin terbentuk oleh sejumlah anggota yang terbatas jumlahnya, karena akan menjadi kesulitan besar untuk mempertahankan ikatan afeksi bila kelompok menjadi besar. Oleh karenanya, apakah mungkin atau bagaimana dapat dipertanggungjawabkan bahwa komunitarian hendak menjadikan komunitas sebagai basis untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. Pemikiran yang lebih lanjut mengenai komunitas mungkin akan membuka cakrawala kita mengenai hal tersebut.

Kaum komunitarian – dengan latar belakang kritik atas individualisme liberal – mengatakan bahwa pandangan kaum liberal mengenai masyarakat dan institusi negara kekurangan satu dimensi “historis dan kontekstual” (Walzer 1989: 544) dalam hidup bermasyarakat, yakni kesatuan orang yang bersama-sama mengusahakan kebaikan bersama berdasarkan nilai-nilai yang dianut

¹⁸ Martin Buber, filosof Yahudi yang pindah dari Jerman ke Israel, mendasarkan pemikirannya tentang hubungan antarpribadi dengan hubungan manusia dengan Allah yang diwarnai dengan kedekatan, rasa hormat, terlebih karena di dalam diri setiap orang terdapat misteri ilahi. Dalam dunia komunitarianisme, nama Buber juga sering disebut dalam rangka mencari pemahaman mengenai komunitas, lih. Etzioni 2001: 356



bersama dan tujuan yang dicanangkan secara komunitas. Pandangan yang mengatakan bahwa unsur pokok masyarakat dan institusi adalah kontrak yang didasarkan pada norma-norma prosedural akan keadilan yang dilakukan individu-individu tidak dapat menjelaskan secara memuaskan luasnya keterlibatan para anggota pada bidang-bidang kemasyarakatan dan hal itu bertahan untuk waktu yang lama. Hal itu dapat dijelaskan bukan berdasarkan pada ketepatan prosedur, melainkan pada nilai-nilai yang dianut secara bersama-sama oleh para anggota komunitas. Daripada berupaya menyusun prosedur yang makin jeli dan rinci, menurut hemat Etzioni, lebih baik upaya diarahkan pada perbaikan komitmen masing-masing anggota akan nilai-nilai bersama.¹⁹

Memang kontrak yang dibuat berdasarkan norma-norma prosedural amat bermanfaat untuk suatu kelompok yang besar, bahkan cara itu merupakan cara yang paling baik. Namun hal itu harus pula dilengkapi dengan mengartikulasikan nilai-nilai yang dianut bersama oleh komunitas (Walzer 1990: 10). Oleh karenanya, Bellah mengatakan „*it is possible to see this supposed contrast of contract versus community as a continuum, or even as a necessary complementarity, rather than as an either/or proposition.*” (Bellah 1995: 50, bdk., Etzioni 1996: 128).

Bila kontrak merupakan pelengkap bagi komunitas yang diikat berdasarkan nilai-nilai, maka muncul pertanyaan baru, yakni apakah komunitas mengandaikan adanya kesepakatan akan nilai-nilai yang dianut bersama, dan bila kesepakatan merupakan syarat untuk komunitas, maka pertanyaan lanjut ialah seberapa besar konsensus yang dibutuhkan agar suatu komunitas dapat terbentuk.

Baik Bellah maupun Etzioni sadar akan pluralitas budaya dalam masyarakat modern, oleh karenanya keduanya sepakat untuk menjawab bahwa konsensus bulat akan nilai-nilai tidaklah realistis, bahkan tidak diharapkan pula. Tidak dapat dibayangkan bahwa dewasa ini masih dapat ditemukan suatu kelompok yang demikian seragam dan dalam menganut nilai-nilai yang sama, kecuali dalam kelompok otoritarian dan fundamentalis. Namun, kurangnya konsensus bulat ini tidak banyak mempengaruhi ketahanan

¹⁹ Pendekatan prosedural, menurut Tavis, dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yakni prosedural deontologis (Kant, Rawls, Kohlberg), prosedural utilitarian (J.S. Mill, dan Adam Smith), dan prosedural kontrak. Basis klaim ketiga kelompok itu berlainan; yang pertama mendasarkan diri pada analisis abstrak yang dilandaskan pada prinsip-prinsip keadilan (*fairness*) universal, yang kedua pada maksimalisasi keuntungan dan kebaikan, dan yang ketiga pada menghormati kontrak agar tatanan sosial dapat dijaga. Meskipun berbeda-beda argumentasinya, namun ketiganya menggarisbawahi satu hal yang sama, yakni kebaikan dan kesejahteraan bersama dicapai dengan menstrukturkan interaksi kelompok-kelompok. Lih. Tavis dan Tavis (2003: 6)



komunitas, karena komunitas mendasarkan diri pada nilai-nilai dan tujuan-tujuan bersama yang substansinya lebih mendasar daripada persetujuan prosedural. Bahkan, adanya beda pendapat, apalagi konflik, mengenai nilai-nilai atau tujuan-tujuan bersama komunitas, merupakan hal biasa bagi komunitas.²⁰ Komunitas bukanlah sekali jadi dibentuk dan dipertahankan, melainkan selalu dalam proses pembentukan. Komunitas “*is not about silent consensus; it is a form of intelligent, reflective life, in which there is indeed consensus, but where consensus can be challenged and changed – often gradually, sometimes radically – over time*” (Bellah 1995: 50).

Budaya moral

Selain ikatan afektif, nilai-nilai dan tujuan-tujuan bersama yang sudah dijabarkan di atas, masih ada satu hal lain yang merupakan unsur pokok untuk memahami komunitas secara benar dan yang mengungkapkan relasi I-Thou, yakni budaya moral.²¹ Unsur kedua inilah yang menjadi kekhasan paham komunitarian mengenai komunitas.²² Yang dimaksudkan oleh Etzioni dengan budaya moral ialah kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dalam suatu komunitas yang diturunkan dari nilai-nilai yang dianut bersama, atau juga bisa sebaliknya, budaya moral akhirnya juga bisa menurunkan nilai-nilai komunitas (Etzioni 2002: 89, *idem* 2002: 20, *idem* 2003: 25).

Dalam pandangan Etzioni, budaya moral amat berperan dalam mengembangkan komunitas dan ikatan komunitas. Budaya moral yang telah tertanam dalam paguyuban akan menurunkan tingkat kebutuhan komunitas untuk tergantung pada hukum, karena hukum itu sudah diinternalisasikan oleh segenap warga dalam diri mereka. Hukum itu bukan lagi berada di luar manusia, melainkan sudah menjadi nilai dan komitmen bersama yang mengendap di sanubari warga komunitas serta biasa dipraktikkan.

²⁰ Selznick mengangkat ketegangan dalam komunitas sebagai ketegangan dalam paradigma I-We berikut: “*Community is characterized by a persistent tension between community and society, between the closed and the open, the parochial and the comprehensive. Neither aspect can be ignored .. this basically hegelian sensibility is difficult to maintain .. we cannot disenthral ourselves from linear, undialectical modes of thought*”, Selznick 1999: 2.

²¹ Emile Durkheim ketika berbicara tentang dasar-dasar hidup sosial menyebutkan perlunya *moral community* yang berisikan terutama keutamaan-keutamaan yang dipegang teguh serta diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. *Moral community* ini mewujudkan nyata dalam apa yang orang modern menyebut sebagai prinsip solidaritas: peran individu dalam arena publik secara timbal balik, Seligman 1995: 30.

²² Sayers secara kritis menyatakan bahwa semua aliran filsafat sepakat mengenai unsur pertama dari komunitas, yakni ikatan antar pribadi, namun budaya moral yang dimajukan melalui persuasi moral, bukan melalui jalan legal-formal menjadi pandangan khas komunitarian, Sayers 1996: 5, lih. Etzioni 2003: 225, *idem*. 2001: 359.



Isi budaya moral yang patut dikembangkan melalui pendekatan-pendekatan informal ialah memajukan *sikap pro-sosial* atau kepekaan sosial: suatu sikap untuk berbuat sesuatu demi kebaikan komunitas. Keutamaan ini perlu disuburkan karena akan banyak mengurangi ongkos sosial dan finansial untuk jangka panjang. Daripada melarang atau memerintah sesuatu menurut peraturan dan hukum formal, komunitarian menunjukkan bahwa penanaman budaya moral akan lebih efektif dan efisien untuk menanggulangi penyakit-penyakit sosial. Misalnya, daripada memperketat hukum tentang abortus, lebih baik memajukan kebiasaan menghargai hidup.

Etzioni menambahkan bahwa mengintroduksi suatu peraturan atau hukum positif pada suatu tempat di mana budaya moral tidak mendukung peraturan atau hukum tersebut hanyalah akan membuat suara moral masyarakat setempat semakin lemah. Sebagai contoh, mengintroduksi peraturan tentang minuman beralkohol dan hukuman bagi yang melanggar peraturan tersebut oleh negara di suatu tempat, tapi tidak mengindahkan tata susunan sosio-budaya setempat, hanyalah akan membuat peraturan-peraturan adat setempat (larangan, sanksi, hukuman, perintah) menjadi lemah dan tidak berfungsi lagi. Bukan lagi tetua adat yang memiliki suara otoritatif, melainkan polisi. Masalahnya ialah peraturan baru tidak efektif untuk menanggulangi alkoholisme, sementara itu suara otoritatif setempat telah didelegitimasi. Maka sekali lagi Etzioni mengajukan proposalnya yakni pengembangan budaya moral melalui persuasi-persuasi informal akan lebih memberdayakan komunitas daripada mengimport peraturan dan hukum formal dari luar. Pendidikan suara hati komunitarian lebih menentukan daripada penanaman hukum formal.

Isi budaya moral yang lain ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pendekatan komunitarian mengekang ungkapan bahwa hak-hak individu menjadi identik dengan setiap keinginan dan interese dan dijamin dengan hukum. Etzioni menegaskan bahwa haruslah terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Memang hak-hak individual seperti kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat, mendapatkan pengadilan yang *fair*, dll., tidak dapat dilepaskan, namun orang juga tidak dapat dikecualikan dari tuntutan melaksanakan kewajibannya untuk mengusahakan kebaikan umum seperti hormat kepada sesama tanpa memperhitungkan latar belakang budaya, jender, orientasi seksual, suku dan bangsa.

Dapat ditanyakan apakah ada kriteria yang dapat dipakai untuk menilai keseimbangan antara hak individual dan kewajiban sosial? Etzioni menunjuk pada *balanced society, good society*. Artinya, masyarakat secara keseluruhan sehat, adil, baik. Suatu saat hak individual diperluas, seperti proteksi informasi personal (mis., *record* medis dalam kasus HIV/AIDS), atau dikurangi seperti pemeriksaan kadar alkohol pada para pengemudi bus umum.



Perluasan atau penyempitan hak-hak individual dan kewajiban sosial demi keseimbangan dan kebaikan masyarakat ini dibicarakan terlebih dahulu dalam dialog budaya. Dalam dialog ini sebanyak mungkin anggota komunitas dan masyarakat terlibat dalam menyumbangkan pendapat tentang isu-isu moral aktual, entah yang terdapat di dalam komunitas itu sendiri atau di lain komunitas. Yang dipertaruhkan dalam kesempatan ini ialah soal nilai-nilai moral komunitas, oleh karenanya peserta dialog bukan hanya terbatas pada para ahli atau elit politik, melainkan seluruh warga. Berdasarkan dan melalui dialog moral ini perilaku, perasaan, dan keyakinan seseorang akan berubah; dengan demikian budaya moral komunitas akan berubah pula.

Individu dan Komunitas

Meski komunitas tidak menuntut konsensus absolut atas nilai-nilai dan tujuan-tujuan bersama, namun tokoh sering orang mempertanyakan otonomi individu dalam komunitas: masih adakah cukup otonomi bagi individu dalam komunitas, ataukah individu ditelan oleh komunitas?

Bila dilihat secara jernih, pertanyaan di atas dilatarbelakangi oleh suatu praanggapan yang mengatakan bahwa individu adalah otonom, bebas dari tekanan dan paksaan institusi atau sesuatu yang lain, sehingga ia dapat memutuskan apa yang baik bagi dirinya sendiri. Paham demikian ini disebut oleh Bellah sebagai *individualisme ontologis* (Bellah 1995: 51). Bila paham itu diikuti terus maka haruslah diterima sebagai konsekuensi logis bahwa individu semacam itu berdiri sendiri, terlepas dari individu-individu lainnya. Kalau demikian halnya, persoalan tentang konsensus nilai-nilai dan tujuan-tujuan bersama seharusnya tidak meresahkan dan bukan merupakan keprihatinan individu. Tiap individu dapat saja memfokuskan diri untuk mengejar apa yang baik menurut keyakinan dan pandangannya.

Apakah dengan penjabaran semacam itu individualisme harus dihilangkan demi komunitas, otonomi harus digantikan dengan tata tertib? Etzioni, dengan belajar dan meneliti secara cermat situasi sosio-politis Timur (secara khusus ia menyebut Asia Tenggara) dan Barat (Eropa dan Amerika Utara), menyatakan bahwa haruslah dicari keseimbangan yang sejati antara keduanya. Keduanya tetap bernilai dan dengan demikian yang satu tidak dapat menggantikan yang lain. Dunia Timur – sambil tetap menghormati pluralitas religius dan budaya masing-masing negara – memiliki sistem nilai dan sistem kepercayaan yang menempatkan komunitas (kebersamaan) pada posisi amat tinggi atau dalam istilah Etzioni *komunitaris otoriter*. Nilai-nilai luhur yang terangkum dalam dunia Timur adalah keutamaan-keutamaan yang sekarang

“terselubung” bagi dunia Barat, yakni, ketaatan, pengorbanan, kebersamaan, dll.²³ (Etzioni 2004: 14,)

Sejalan dengan analisis Louis Hartz yang terdapat dalam *The Liberal Tradition in Amerika: An Interpretation of American Political thought since the Revolution*, nilai-nilai yang menjadi pandu sejarah adalah hak, kebebasan, individu dan pemerintahan yang demokratis. Tentu nilai-nilai ini tidak akan dikorbankan begitu saja demi nilai-nilai lain. Oleh karenanya, sekali lagi Etzioni menyarankan perlunya keseimbangan antara otonomi dan tatatertib.

Dalam perkembangan, Barat dan Timur makin merasakan adanya kekurangan pada nilai-nilai yang selama ini dipegang. Di Amerika Serikat sekarang ini bukan hanya terdapat satu aliran politik, melainkan dua aliran yang sama kuatnya, yakni individualisme dan komunitarian yang menyatu dalam – yang disebutnya dengan – “keutamaan-keutamaan republik dan nilai-nilai liberal”, (Etzioni 2004: 15-16) Di Jepang individualisme makin merambah luas di masyarakat, orang bebas mengungkapkan perasaan dan pendapat, dan di pihak lain juga tetap dijunjung tinggi kewajiban anak terhadap orang tua, bangsa, yang merupakan nilai-nilai tradisional (Etzioni 2004: 18). Maka, nilai-nilai otonomi perlu mendapatkan padanannya pada nilai-nilai komuniter. “Defisit” nilai komuniter pada Barat perlu dilengkapi dengan “surplus” nilai komuniter dari Timur, begitu juga sebaliknya.²⁴ Dengan meminjam metafor dari dunia ekonomi, Etzioni berpendapat, daripada mengeksplor nilai-nilai yang setengah benar, komunitas belajar dari komunitas lain (Etzioni 2004: 19, lih.pula Etzioni 1998;172).

Service Learning

Service learning merupakan suatu bentuk aksi sukarela yang dilakukan bukan hanya demi kepentingan orang yang dilayani, tapi juga bermanfaat bagi pembentukan diri sendiri dan memperoleh pengalaman sosial bersama orang lain (Etzioni, 2002: 12, *idem*. 2004: 28).

²³ Etzioni mengutip pidato Lee Kuan Yew sebagai contoh komunitarian otoriter Timur: “*als Gesamtsystem finde ich Teile (der Vereinigten Staaten) völlig inakzeptabel: Waffen, Drogen, Gewaltverbrechen, Stadtstreicherei, ungehöriges Verhalten in der Öffentlichkeit – kurz gesagt, der Zusammenbruch der Zivilgesellschaft. Die Ausweitung der Rechte des Einzelnen, sich so zu verhalten oder so schlecht zu benehmen wie es ihm gefällt, ist auf Kosten der wohl geordneten Gesellschaft gegangen. Diese aber ist das Hauptanliegen im Osten, so dass jeder seine Freiheiten optimal genießen kann. Diese Freiheit kann nur in einer geordneten Gesellschaft existieren un nich in einem Naturzustand von Streit und Anarchie*“. Dikutip dari Etzioni 2004: 15.

²⁴ Etzioni menengarai perubahan ini dengan istilah *soft*, di wilayah yang sebelumnya terlalu memberikan kebebasan individual berkembang *soft otonomy*, sementara di daerah yang sebelumnya dikuasai oleh negara menjadi *soft power*. (Etzioni 2004: 21)

Service learning yang dimengerti demikian itu amat bermanfaat bagi komunitas. Perubahan budaya moral melalui dialog budaya perlu dilengkapi dengan praksis yang membuka horison pengetahuan komunitas, dengan belajar pada komunitas yang memiliki sistem nilai dan kepercayaan lain. Ikatan komunitas juga akan ditingkatkan kualitasnya dengan *servis learning*, sehingga ikatan tersebut merangkul sebanyak mungkin komunitas-komunitas yang lain.

Service learning juga bermanfaat bagi negara yang mengirimkan pasukan humaniter atau kelompok relawan sipil ke negara yang membutuhkan bantuan akan belajar dari negara lain tentang nilai-nilai yang dihayati warga negara tersebut. Mereka tidak pergi dengan membawa bendera ideologi atau anggapan superioritas negara mereka, atau lebih celaka lagi, anggapan akan kemampuan untuk menentukan apa yang baik bagi negara yang hendak dibantu.

Good Society: Negara, Pasar, dan Komunitas

“Masyarakat yang baik adalah kemitraan antara tiga sektor, yakni pemerintah, sektor privat, dan komunitas. Setiap sektor mencerminkan dan menyumbangkan hal yang berbeda bagi kemanusiaan kita. Hanya dengan memberdayakan ketiganya – daripada memfragmentasikannya atau malahan memperlawankannya satu sama lain – kita dapat mencapai suatu masyarakat yang mengarahkan keseluruhan pribadi kita, yakni tujuan akhir pada dirinya sendiri.” (Etzioni 2002: 24) Manifesto politik ini hendak melampaui *The Third Way* Gidden.

Bagi Etzioni ketiga sektor tersebut berbeda dalam masing-masing peran dalam mengembangkan masyarakat, namun ia juga menandakan bahwa ketiga sektor tersebut akan berubah seturut tuntutan setempat. Dengan demikian ia tidak menentukan standard dan patokan-patokan yang mengejawantahkan relasi antarketiganya. Yang penting bagi profesor Universitas George Washington itu ialah keseimbangan (*shared formulation, shared values, shared goals*)

Kewajiban utama negara ialah menjamin keamanan publik, karena dengan itu tercipta kondisi yang memungkinkan semua aktivitas pasar maupun komunitas dapat berjalan.²⁵ Demi keamanan publik, negara juga dapat diberi wewenang untuk melakukan sensor dan deteksi di *cyberspace*.²⁶ Negara juga

²⁵ Etzioni tidak sependapat dengan orang yang mengizinkan orang sipil memegang senjata akan mengurangi tugas negara untuk menyediakan pasukan keamanan maupun akan meningkatkan tindak kekerasan antar warga komunitas atau warga negara, yang dengan demikian bertindak melawan prinsip “memperlakukan orang lain sebagai tujuan akhir pada dirinya sendiri”. Etzioni 2003: 24.

²⁶ Etzioni membahas hal ini secara khusus dalam *A Communitarian Perspective on Privacy* yang memperlihatkan ketegangan hak privasi tiap individu juga di internet dan



berkewajiban menjamin hukum dan menegakkan aturan, sehingga setiap bentuk pelanggaran haruslah dihukum. Namun mesti dijaga bahwa hukuman itu tidak merendahkan martabat si pelanggar hukum tersebut dan ringan.²⁷ Selain itu negara juga berkewajiban menyediakan sarana kesehatan publik dan menjaga kesehatan masyarakat dengan menetapkan larangan yang mengganggu kesehatan publik lain: seperti merokok, minuman beralkohol, obat-obat terlarang, dll. Selain menjamin keamanan, negara patut pula – dalam situasi tertentu – membuat intervensi terhadap pasar, agar pasar tidak menargetkan produksi yang dapat merusak anak-anak. Negara juga mendorong pasar agar menyediakan lapangan kerja bagi warga dan menetapkan upah wajar agar *rich minimum standard of living* terpenuhi. Terhadap komunitas, negara mendorong berkembangnya komunitas-komunitas tanpa menjadi agen utama pertumbuhannya. Komunitas sendiri haruslah menumbuhkan kelompok-kelompok relawan yang dapat mengurus sendiri, misalnya simpan pinjam, pengasuhan anak, perawatan orang sakit.²⁸

Posisi negara berhadapan dengan pasar dan komunitas seperti dicontohkan di atas mengurangi kecondongan otoritarianisme yang mau menjadikan negara berada di atas pasar dan komunitas. Peran dan posisi negara menjadi lebih fleksibel, bisa menjadi pemimpin, penjamin, dan pendukung (Etzioni 2004: 18).

Agen utama sektor privat ialah pasar. Lionel Jospin berkata „*We are not against market-based economy but market-based society*“²⁹. Artinya hukum ekonomi memang dikembangkan berdasarkan pasar, namun pasar tidak dapat menjadi panglima tertinggi dalam membentuk dan mengembangkan masyarakat. Tetap diakui bahwa pasar merupakan alat paling unggul untuk memproduksi barang-barang, jasa, kerja, dan dengan demikian perkembangan ekonomi masyarakat. Namun masyarakat tidak dapat diabdikan pada pasar karena masyarakat tidak dapat direduksikan pada relasi instrumental.

kepentingan negara untuk menjamin keselamatan seluruh warga. Bila di internet atau lewat email disebarkan cara-cara, misalnya membuat bom, maka negara boleh mengadakan intervensi di dalamnya. Shanker 1995, “Make Bomb, not porn” dalam *Responsive Community* vol. 6 (1995,1): 11-14

²⁷ Tema tentang hukuman dan pengampunan dari sudut pandang komunitarian menarik banyak orang untuk mencari penyelesaian atas konflik-konflik yang berkepanjangan, lihat Meyer, “Reconciliation and Public Trust”.

²⁸ Termasuk kewajiban negara pula mengusahakan agar semua orang mendapatkan kebutuhan dasar untuk hidup secara mencukupi (*rich basic minimum standard of living*). Bagi negara, tugas ini merupakan kewajiban pokok, sementara itu komunitas wajib mendorong dan menumbuhkan kelompok-kelompok volunteer, mengembangkan *extended family*, arisan, kegiatan amal. Etzioni 2003: 18.

²⁹ Dikutip dari Etzioni 2002: 27.



Selain membawa keuntungan pada negara dan komunitas, pasar juga seringkali membawa masalah seperti pengangguran, PHK, lingkungan hidup. Tugas negara dan komunitas untuk mengatasi hal-hal tersebut. Lagi pula, negara dan komunitas juga mengimbangi kekuatan pasar dengan membentuk lembaga yang menjamin keadilan sosial, keselamatan lingkungan, dll.

Visi komunitarian mengenai keseimbangan antara ketiga sektor itu ialah ketiganya terlibat dalam menentukan dan merumuskan penentuan apa yang baik bagi masyarakat (*shared formulation*), sehingga penentuan dan perumusan itu tidak diserahkan saja pada negara (*statisme*), atau individu (*liberalisme/individualisme liberal*). Hubungan antara ketiga sektor tersebut adalah komplementer satu sama lain, bukan yang satu menyingkirkan atau menggantikan yang lain. Dengan mengatakan keseimbangan, maka komunitarian tidak berpretensi menggantikan negara atau pasar menjadi komunitas.³⁰

Apakah alasan komunitarian mengedepankan relasi yang komplementer antara ketiga sektor tersebut daripada relasi eksklusif? Bila dipikirkan lebih jauh, solusi “atau-atau” relasi antara pasar atau negara memperlihatkan pengandaian individualistik dari keduanya, yakni setiap sektor bebas dan berhak secara sendiri menentukan apa yang baik bagi dirinya. Sektor yang memberikan peluang yang lebih besar atau paling baik untuk merealisasikan individu, pastilah yang akan dipilih (Bellah 1995: 51). Demikian pula komunitas tidak akan dapat bekerja sendirian dalam mewujudkan kebaikan umum. Ia memerlukan negara dan pasar untuk mewujudkan kemanusiaan utuh para anggotanya.

Penutup

Komunitarian sebagai filsafat maupun politik memberikan sumbangan besar bagi dunia intelektual dan politik karena mengangkat nilai-nilai tradisional yang merupakan bingkai kehidupan masyarakat seperti ikatan komunitas/budaya, kebersamaan, kerelaan dalam pelayanan.

Namun – sambil sadar akan fakta pluralisme yang mencirikan dunia modern dan negara demokratis – komunitarian tidak akan membanting kemudi dan berputar kembali ke masa lampau (Bellah 1995: 50, Etzioni 2004: 16). Tinjauan kritis atas komunitas tradisional yang mendiamkan atau menutupi penindasan dan ketidakadilan melalui pola-pola budaya yang tidak adil,

³⁰ Etzioni menanggapi buku Elisabeth Frazer 2000, *The Problems of Communitarian Politics: Unity and Conflict* yang mengatakan “The state-society formulation altogether should become a community; power and authority that has been accrued by individuals on the one hand, and the state and its bureaucratic agencies on the other, should be given back to the ‘community’” dengan menyatakan “profoundly misguided”, Etzioni 2000: 9.

komunitarian mengangkat pentingnya nilai-nilai otonomi, hak, dan pemerintahan demokratis sebagai padanan atas nilai-nilai kewajiban sosial, ketaatan, dan pelayanan sukarela (Etzioni 2002: 20 dst., Selznick 1999:2).

Dengan menjadikan komunitas sebagai partner setara dengan negara dan pasar, komunitarian menunjukkan kepada masyarakat demokratis kontemporer tempatnya dalam dunia kehidupan yang nyata, di mana upaya memperbaiki situasi dan diskusi memperoleh wajah manusiawinya, yakni orang-orang yang hidup di komunitas, keluarga, dan kelompok-kelompok suku, profesi, dll. (Bellah 1995: 50). Diskusi dan debat mengenai negara ideal sering menjadi abstrak dan kehilangan tempat pijaknya di dalam kehidupan nyata. Komunitarian tidak takut terjun di arena teoretis, namun tidak canggung pula masuk di dunia praktis. Komunitarian hendak mengikat kedua dunia tersebut dengan mau mengerti “hal-hal kontingen yang mempengaruhi hidup orang-orang konkret” sambil memahami aspirasi-aspirasi luhur manusiawi, fungsi institusi-institusi modern (Selznick 1999:2).

Namun, kepada komunitarian yang mau mempertahankan kekhasan dan kemajemukan tiap-tiap komunitas dapat ditanyakan bagaimana masyarakat sebagai *community of communities* dapat tetap bertahan di tengah aneka macam keyakinan yang berbeda, bahkan mungkin pula berlawanan? Pemecahan Etzioni yang mengedepankan “keseimbangan” (otonomi-tata tertib, hak-kewajiban) sering menjadi sasaran tembak para kritikus, karena ia tidak mengembangkan seperangkat teori yang mampu mengayomi nilai-nilai yang bertegangan satu sama lain (Gawkowska 1999: 18-31). Pemecahan pragmatis – yang menghindari atau menekan konflik demi keselarasan budaya dan konsensus (Etzioni 1999:5) – sering tidak memuaskan karena tiap-tiap unsur yang bertentangan tidak dibahas secara mendalam dan diandaikan bila ada konflik maka konflik itu terbatas pada wilayah konsensus komunitas (shared values and goals), sehingga konflik yang sungguh-sungguh tidak terdapat dalam komunitas. Misalnya, komunitas lokal hendaknya berpegang pada “norma-norma yang menjadi jati diri komunitas dan mengembangkannya melalui institusi sosial dan hukum”, namun di lain pihak komunitas haruslah loyal pula pada nilai-nilai universal yang menjadi “pengarah serta kerangka” nilai-nilai komunitas. Menjadi persoalan bila terdapat maksimalisasi kedua unsur, yang membuat yang satu akan mengosongkan yang lain. Maka bila itu terjadi, pemecahan yang diajukan Habermas tentang etika diskursus lebih memadai daripada pemecahan Etzioni. Selanjutnya, menurut Gawkowska, diperlukan suatu konstruksi baru untuk mengeksplisitkan hirarkhi nilai yang selama ini tidak digarap oleh Etzioni. Nilai-nilai yang saling bertegangan, hanya dapat eksis dalam suatu kerangka umum yang menempatkan tiap-tiap nilai

pada tata urutan yang dikemukakan satu (perangkat), yang menurut komunitarian, kiranya ialah KEBAIKAN atau hidup baik.³¹

Maka komunitarian masih memiliki agenda raksasa untuk diselesaikan.



Daftar Pustaka

- Bellah, Robert. 1995. "Community Properly Understood: A Defense of 'Democratic Communitarianism'" dalam *The Responsive Community* vol. 6 (1995, 1): 49-54.
- Demmerling, Christoph. 2002. „Der Kommunitarismus und die Herausforderungen der multikulturellen Gesellschaft“, dalam H.J. Martin (peny.) *Am Ende die Ethik? Begründungs und Vermittlungsfragen zeitgemäßer Ethik*, Münster, 24-42.
- Dietrich, Frank. 1998. "Die kommunitarische Kritik an John Rawls' Theorie des Gesellschaftsvertrages", makalah yang disajikan pada seminar 12 Desember 1998 di Universitas Duisburg, www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/sowi/lsi/vortraeg/kommun.htm
- Ehm-Schöninklee, Martina. 1994. „Kommunitarismus. Referat“, paper seminar „Teori Politik“. Di-download dari www.loidolt.at/gerstl.
- Epstein, Renaud. 2002. "Une défense et illustration de la pensée communautarienne" dalam *Societal* no. 38 (2002,4).
- Etzioni, Amitai. 1988. "Toward a Socio-economic Paradigm" dalam Paul J. Albanese (peny.) *Psychological Foundation of Economics Behaviour*, New York: Praeger, 165-172.
- _____ 1996. "Community of Communities" dalam *The Washington Quaterly* vol. 19 (1996, 3): 127-139.
- _____ 2000. "A Communitarian Perspective on Privacy" dalam *Connecticut Law Review* vol 32: 897-905.
- _____ 2000. *The Third Way to a Good Society*, Demos.

³¹ Habermas membedakan *hidup baik* dan *hidup yang adil*, yang pertama menyangkut nilai-nilai, sedangkan yang kedua tentang norma moral. Hidup baik bertalian erat dengan keyakinan, pandangan dan identitas kelompok, dan dengan *dunia kehidupan*, oleh karenanya tidak universal. Magnis-Suseno 2000:231.

- _____ 2001. „On Social and Moral Revival“, dalam *The Journal of Political Philosophy* IX (2001,3): 356-371.
- _____ 2002. “The Good Society” dalam *Seattle Journal for Social Justice* vol. 1 (2002,1), 83-96.
- _____ 2003. “In Defense of *Diversity Within Unity*” dalam *The Responsive Community* vol. 14 (2003, 2): 52-57.
- _____ 2003. „Communitarism“ dalam Christenen, Karen dan David Levinson 2003, *Encyclopedia of Community: From the Village to the Virtual World. Vol 1*: 224-228.
- _____ 2004. “Wie eine gute globale Gesellschaft entsteht” dalam *IPG* 2 (2004), 12-30.
- Gawkowska, Aneta. 1999. “Neutrality, Autonomy and Order: Amitai Etzioni’s Communitarian Critique of Liberalism under Scrutiny” dalam *A Decade of Transformation. IWM Junior Visiting Fellows of Conferences*, vol VIII/4: 1-31.
- Geertz, Clifford. 1993. *Tafsir Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Gilman, Michele E. 2004. „Communitarianism and Social Welfare“, paper pada seminar Program for Clinical Legal Education Conference.
- Kapur, Basan K. 1999, „Harmonization between Communitarian Ethics and Market Economics“ dalam *Journal of Market and Morality*. 2 (1999, 1), 35-52
- Magnis-Suseno, Franz. 2000. *Dua Belas Tokoh Etika Abad XX*, Yogyakarta: Kanisius
- Nuebel, Hans. 2000. “Give World Religion a Chance to Justify Communitarian Relations” dari www.dekomnetz.de.
- Proske, Matthias. 1994. “Zur Debbate um den Kommunitarismus. Eine kommentierte Bibliographie“, di-download pada 17 Februari 2004 dari www.st-georgen.uni-frankfurt.de/nbi/publ/fagst.html.
- Putnam, Robert D. 1995. “Bowling Alone: America’s Declining Social Kapital” dalam *Journal of Democracy*, (1995, 6): 65-78.
- Sayer, Sean. 1996. „Identity and Community“ paper yang dibacakan pada Universities of Kent, Warwick.
- Seligman, Adam B. 1995. “The Changing Precontractual Frame of Modern Society” dalam *The Responsive Community* vol. 5 (1995, 1), 28-40.
- Selznick Philip. 1999. “A Tribute to Amitai Etzioni”, pidato yang dibawakan pada 11Th Annual Meeting on Socio-Economics pada SASE.

- Shanker, Albert. 1995. "Make Bombs, Not Porn?", dalam *Responsive Community* vol. 6 (1995,1), 11-14.
- Tavis, Timothy and Lee A. Tavis. 2003. "Managing the Corporation as Community", pada tanggal 17 Februari 2005 di-download dari www.stthomas.edu/cathstudies/cst/mgmt/bilbao/otherpapers.html.
- Taylor, Charles. 1989. *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Ujan, Andre Ata. 2001. *Keadilan dan Demokrasi. Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius.
- Walzer, M. 1990. "The Communitarian Critique of Liberalism" dalam *Political Theory* 18 (1990,1), 6-23.
- Walzer, M. 1997. *Thick and Thin. Moral Argument at Home and Abroad*, Notre Dame: Notre Dame Uni. Press.
- Walzer, Michael. 1989. "Nation and Universe" naskah yang dibawakan pada *The Tanner Lectures on Human Values*, Universitas Utah, di-download dari <http://www.tannerlectures.utah.edu/lectures/walzer90.pdf>.
- Zimmer, Annette. 2001. "Dritter Sektor und Soziales Kapital", dalam *Gegenwartskunde* 50 (2001,1): 121-147.

